



DANA BOS DAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH TIMUR INDONESIA

Gilang Gumilang Dawous¹⁾, Silvi Setya Oktaviany²⁾, Moch Rizky Ashari³⁾

¹⁾ Administrasi Pendidikan ^{2,3)} Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah

¹⁾ Universitas Pendidikan Indonesia ^{2,3)} STAI Darul Falah

*Email: gilangdawous@upi.edu, gilangdawous@staidaf.ac.id, oktavianysilvi01@gmail.com,
rizkyashari32@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Dana BOS bagi pemerataan layanan pendidikan di daerah timur Indonesia. Tujuan dana BOS ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan observasi dan studi dokumentasi pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, terluar, dan terdalam khususnya di kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian ini membahas model *Flat Grant* sebagai model dana BOS yang dihitung berdasarkan jumlah siswa membuat sekolah di daerah timur sedikit terhambat dalam mengelola anggaran. Kemudian, dengan akses pendidikan yang sulit, keterbatasan sumber daya, perilaku masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari sekolah dan biaya kebutuhan yang mahal di daerah 3T. Maka pemerintah daerah harus lebih peduli mengenai kebijakan, perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang harus berkesinambungan. Kesinambungan ini penting dalam manajemen biaya pendidikan, agar semakin baiknya pengelolaan biaya pendidikan, maka akan semakin baik pula hasil *output* dari sekolah sebagai produktivitas suatu bangsa.

Kata Kunci : Dana BOS, Pemerataan Layanan Pendidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the BOS Fund is implemented for equitable distribution of education services in eastern Indonesia. The purpose of this BOS fund is to improve the quality of learning and equitable access to education services. The research method used is by observation and documentation studies in schools located in remote, outermost, and deepest areas, especially in Teluk Wondama district, West Papua Province. The results of this study discuss the Flat Grant model as a BOS fund model calculated based on the number of students making schools in the eastern regions a little hampered in managing budgets. And then, with difficult access to education, limited resources, the behavior of people who do not fully understand the benefits of schooling and the expensive cost of necessities in the 3T area. So local governments must be more concerned about policies, planning, allocating, distributing, using, accountability, and reporting that must be sustainable. This continuity is important in the management of education costs, so that the better the management of education costs, the better the output of schools as the productivity of a nation.

Keyword: BOS Funding, Education Services.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peranan biaya (Habsyi, 2016). Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan. Hampir tidak ada penyelenggaraan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa biaya, biaya pendidikan adalah semua pengeluaran, baik berupa uang maupun tidak, sebagai wujud tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan. Melalui pendidikan akan lahir generasi yang berkualitas dan unggul, sehingga pendidikan merupakan faktor penting untuk mewujudkannya. Pembiayaan pendidikan diperlukan untuk program sekolah, gaji guru, gaji pegawai, dan kebutuhan lainnya yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi. Kemudian penilaian terhadap program pembelajaran juga perlu dilakukan dengan baik, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program pembelajaran terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan operasional sekolah, pemerintah membuat sebuah program yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain terkait akses, program ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesiapan keuangan atau sumber daya keuangan secara nasional merupakan masalah yang paling krusial dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia (Hadiyanto, 2004). Oleh karena itu, meskipun program ini dinilai belum efektif (Akbar, 2016), BOS menjadi salah satu program andalan pemerintah yang masih terus berjalan karena dianggap berdampak signifikan dalam penyelesaian wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Andi, AR2, & Nasir Usman, 2015). Bantuan dana pendidikan ini diklaim sebagai salah satu upaya efektif untuk meningkatkan akses penyelesaian wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. BOS dinilai dapat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan prestasi siswa. Idealnya, minimnya biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi seseorang, bahkan bagi masyarakat yang sangat kekurangan secara ekonomi, untuk putus sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk nyata dari penerapan kebijakan pemerintah dalam usaha memfasilitasi pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan (Nani, Y. N., 2021), khususnya untuk merealisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. BOS merupakan penerapan dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang membahas mengenai usaha pemerintah dalam mewujudkan terselenggaranya program pendidikan gratis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bertujuan agar peserta didik tidak lagi diberatkan oleh biaya pendidikan.

Program dana BOS telah dijalankan sejak bulan Juli 2005, hal ini sangat berpengaruh pada ketercapaian program wajib belajar 9 tahun. Untuk menindaklanjuti perubahan positif ini, pada tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari yang awalnya berfokus terhadap perluasan cakupan menjadi berfokus ke peningkatan kualitas. Penelitian Sulistyaningrum (2016) menemukan bahwa BOS mendorong performa siswa di sekolah. Temuan ini semakin menguatkan bahwa program yang meringankan biaya sekolah perlu semakin dikembangkan agar semua masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam pendidikan.

Kebijakan keuangan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat penting pada setiap layanan dan program pendidikan, pada ekonomi nasional, pada kesejahteraan individu, dan

bahkan pada kesejahteraan bangsa itu sendiri, sehingga keuangan pendidikan tidak dapat dipelajari secara memadai secara terpisah dari sistem sosial kita secara keseluruhan (Johns, R. L., & Morphet, E. L., 1975). Adanya program BOS ini juga harus didukung oleh kemampuan sekolah dalam merencanakan, pelaksanaan pembelanjaan, evaluasi serta dalam membuat laporan pertanggung jawaban secara transparan terhadap anggaran yang telah diberikan. Hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan apabila digunakan secara tepat.

Di lapangan, hambatan mengenai penggunaan dana BOS masih banyak ditemukan (Sibarani, E. E., & Tarigan, U., 2013). Hal ini seringkali berkaitan dengan adanya penyalahgunaan ataupun ketidaktepatan dalam mengelola dana BOS di sekolah/madrasah. Maka dari itu, penting memahami bagaimana pemanfaatan dana BOS pada satuan pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan dalam mengakses penyelenggaraan pendidikan seperti daerah 3T (Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Wilayah ini tidak terlepas dari permasalahan sistem pembangunan yang tidak merata sehingga berdampak pada sulitnya memperoleh mutu pendidikan. Implementasi pengalokasian dana BOS di daerah khusus diharapkan mampu membangun pemerataan pendidikan serta layanan pendidikan yang mengedukasi para masyarakat lokal melalui dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional lainnya. Artikel ini membahas bagaimana pemanfaatan dan pengalokasian dana BOS di daerah timur Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi penyelenggaraan pendidikan di sana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi pada sekolah-sekolah yang berada di daerah Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat dengan di dukung studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data dari catatan, laporan, serta foto-foto keadaan dan kondisi lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa studi dokumen pada penelitian kualitatif adalah cara peneliti dalam mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan, laporan serta keterangan-keterangan tertulis yang mendukung penelitian dan selanjutnya menjadi bahan untuk ditelaah oleh peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian membahas deskripsi hasil olah data penelitian serta pembahasan yang terdiri dari analisis penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan dapat berupa analisis kritis kuantitatif dan kualitatif yang sesuai dengan teknik penelitian yang digunakan serta dikaitkan dengan kajian literatur penelitian dan teori yang relevan sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan.

Pembiayaan pendidikan merupakan sebutan bagi sumber keuangan dan barang yang disediakan untuk pendidikan. Pembiayaan pendidikan di dalamnya memaparkan bagaimana sumber dana diperuntukkan, dimanfaatkan serta dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan pendidikan untuk semua peserta didik. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 membahas mengenai bagaimana pemerintah wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar seluruh warganya sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemenuhan dana pendidikan sebesar 20% sebagaimana amanat UUD 1945 hasil amandemen

merupakan refleksi harapan mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu lebih lanjut dinyatakan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3 dan 4: Pasal 3: "Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas".

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini tidak lagi terpusat hanya dalam meningkatkan kemudahan semua orang dalam mengakses pendidikan, namun juga dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Apalagi pemerintah memiliki visi dan misi ditahun 2025 untuk menjadikan sistem pendidikan di Indonesia "berkelas dunia". Shaturaev, J. (2022) menerangkan masalah politik dan kekuasaan merupakan akar dari buruknya kinerja pendidikan di Indonesia, selain dari permasalahan sedikitnya alokasi biaya yang dianggarkan untuk pendidikan, rendahnya sumber daya manusia dan manajemen yang buruk dalam pengaturan insentif. Perubahan kualitas sistem pendidikan Indonesia dengan demikian bergantung pada pergeseran keseimbangan kekuatan antara koalisi yang bersaing yang memiliki kepentingan dalam sifat kebijakan pendidikan dan implementasinya.

Wajib belajar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang serius seperti pendanaan, hasil akademik yang buruk, kekurangan guru baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kendala-kendala ini membuat Indonesia jauh dari pencapaian akademik yang sangat baik bahkan dengan pengeluaran negara untuk pendidikan tinggi. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 12 tahun, tetapi banyak orang di Papua yang berhenti sekolah lebih awal. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa anak-anak putus sekolah lebih awal terutama karena alasan ekonomi, dan mengatasi masalah tersebut melalui program kesejahteraan sosialnya, serta faktor 'penawaran' seperti jumlah sekolah (Parker, L., & Sudibyo, L., 2022). *Flat grants* model adalah model pembiayaan pendidikan yang diberlakukan pemerintah untuk setiap daerah/sekolah mendapatkan besaran jumlah dana yang sama untuk setiap siswa, tidak membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Rida Fironika, K., 2011). Menggunakan sistem pembagian dana, di mana semua kabupaten menerima jumlah dana yang sama untuk setiap murid, tidak menunjukkan perbedaan kemampuan lokal. Daerah yang memiliki sumber daya yang mumpuni mendapatkan jumlah dana yang sama dengan daerah yang miskin (Saputra, A., 2018). Pemerintah dalam hal ini tidak mempertimbangkan kemampuan sumber daya daerah (APBD) dalam mendistribusikan dana pendidikan. Istilah lain dari model ini adalah sistem bagi rata sehingga ada kemungkinan daerah/sekolah yang sudah memiliki pendanaan yang memadai akan lebih diuntungkan dari model ini. Contoh dari model pembiayaan ini di antaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Di tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021. sebesar Rp52,5 triliun yang akan dibagikan secara merata kepada 216.662 sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Mulai tahun 2021, jumlah biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota (Gismar, A. M., dkk., 2014). Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana BOS akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah dalam menjalankan pembelajaran dan Asesmen Nasional.

Besaran biayanya tetap dihitung dengan besaran satuan biaya daerah per masing-masing wilayah kabupaten kota dikalikan dengan jumlah peserta didik yang sudah terdaftar pada aplikasi sistem Data Pokok Pendidikan di Kemendikbud. Untuk jumlah siswa kurang dari 60 orang pada daerah khusus yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, maka penyaluran pendanaan akan tetap dihitung dengan jumlah peserta didik sebanyak 60 orang. Proses pencairan dana BOS ini akan langsung dikirimkan ke sekolah melalui rekening yang sudah didaftarkan dan bukan melalui kewenangan dinas pendidikan daerah lagi.

Dana BOS afirmasi merupakan program yang diperuntukkan bagi daerah khusus yang telah ditetapkan Kemdikbud bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Daerah khusus ini adalah daerah dengan kondisi masyarakat yang terdepan, terpencil, dan terluar. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana BOS Reguler. Dana BOS Reguler ini adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari alokasi khusus non-fisik. Pemberian BOS Afirmasi ini dapat membantu meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Beberapa prinsip dalam pemanfaatan Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi yang dijelaskan oleh BBPMP Jatim (2021) yaitu:

- (1) Fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- (2) Efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
- (3) Efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- (4) Akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangan-undangan;
- (5) Transparansi yaitu penggunaan dana dikelola terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Jumlah pengalokasian dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing-masing adalah sebesar 60 Juta Rupiah setiap sekolah. Dana ini digunakan untuk membiayai anggaran operasional sekolah sesuai dengan petunjuk dan standar pembiayaan perundang-undangan komponen penggunaan dana BOS Reguler. Dana ini tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab dilakukan oleh tim yang terlibat sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku di antaranya adalah Tim BOS Provinsi, Tim BOS kota dan Kabupaten serta Tim BOS sekolah (Sulfiati, F., Alam, A. S., & Irwan, A. L., 2010).



Gambar 1. Kondisi Fasilitas Pembelajaran akibat dampak yang kurang terkelola dengan baik di Daerah 3T.

Pendanaan BOS yang menggunakan model FLAT GRANT sebagai Model Pembiayaan membuat pemerataan layanan pendidikan memiliki kesenjangan khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). *Flat Grant* yang dihitung berdasarkan jumlah siswa membuat sekolah yang memiliki siswa yang sedikit agak terhambat dalam mengelola anggaran. Sistem pendidikan yang minim, jumlah tenaga pengajar yang sedikit dan kualitasnya masih belum sesuai, infrastruktur, dan fasilitas sekolah terbatas. Seadanya pembelajaran (Vito, B., & Krisnani, H., 2015; Putera, M. T. F., & Rhussary, M. L., 2018) serta terlebih lagi, dengan akses pendidikan yang sulit, keterbatasan sumber daya, perilaku masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari sekolah dan biaya kebutuhan yang mahal di daerah 3T. Ini membuat masyarakat lebih memilih menjadi pekerja buruh dengan membawa anak-anaknya daripada mengikuti pembelajaran di sekolah. Masyarakat beranggapan bahwa sekolah yang tidak layak tetap saja tidak akan membuat anak-anaknya menjadi lebih baik, dikarenakan akses dan pembangunan yang memiliki kesenjangan satu sama lainnya membuat semakin sulitnya mengatur kualitas pendidikan dengan model pembiayaan berbasis *flat grant*.

Pendapatan dana sekolah yang bersumber dari perhitungan jumlah siswa menyebabkan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang sedikit tidak mampu membiayai operasional sekolah dengan optimal. Daerah 3T yang sulit mengakses layanan pendidikan, kurangnya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, lemahnya perkembangan pengetahuan, minimnya mengakses keuangan sekolah menimbulkan polemik manajemen biaya pendidikan. Untuk merencanakan kebutuhan anggaran sekolah dan kebutuhan SDM saja masih terbatas, apalagi mengembangkan potensi dalam proses pembelajaran. Negara menuntut agar sekolah mampu bersaing untuk meningkatkan mutu layanan pembelajar, akan tetapi proses manajemen biaya yang tidak optimal di daerah 3T menimbulkan kegelisahan akan kesenjangan yang berkelanjutan.

Walaupun daerah 3T khususnya di Papua Barat dan Papua memiliki dana otonomi khusus, yang 30 persennya dapat digunakan untuk pendidikan, tetapi proses manajemen biaya dalam persekolahan tidak berjalan dengan baik karena akses, SDM dan sarana prasarana yang belum terbangun untuk mewujudkan layanan pembelajaran yang berkualitas. Hasil penelitian dari Samputra, P. L. (2020) menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua tahun 2014-2017. Upaya strategis dalam pembangunan di Papua diperlukan tidak hanya melalui penyaluran Dana Otonomi Khusus, tetapi juga peningkatan kapasitas aparatur, evaluasi cara penyaluran dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, serta kebijakan lain yang berwawasan lokal. Permasalahan dana alokasi khusus ini tidak maksimal dikarenakan tidak dikelola dengan baik, sinkronisasi perencanaan yang rendah, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan, keterlambatan pelaporan, dan sosialisasi aturan pendanaan (Tatogo, M., Layuk, T. A., & Bharanti, B. E., 2018). Kuddy, A. L. L. (2018), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa transparansi menjadi permasalahan lain dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Partisipasi masyarakat yang belum terlibat penuh dalam program dan kegiatan pendidikan pun menjadi kendala pembiayaan pendidikan, di samping pengawasan inspektorat dan DPRD yang kurang optimal.



Gambar 2. Kondisi Bangunan Kelas di Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama menjadi saksi kesenjangan pemerataan layanan pendidikan di daerah berbasis 3T.

BOS sebagai biaya operasional sekolah seharusnya digunakan untuk membiayai persoalan operasional, akan tetapi sering kali digunakan untuk menutup terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan mendasar dari sekolah seperti gaji guru, kebutuhan perbaikan fasilitas sekolah, dan membiayai kebutuhan akses ke sekolah. Kebutuhan utama terkait akses pendidikan di daerah 3T membuat dana BOS dipakai terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari proses pembelajaran, bagaimana tidak ketika seorang guru ingin mengambil gajinya, ia harus menyewa perahu nelayan yang biaya sewanya hampir setengah dari gaji yang ia dapatkan.

Akses dari pulau terpencil ke daerah pusat pemerintah hanya bisa diakses dengan berjalan kaki (apabila sekolah dari distrik berada di dalam hutan) serta menyewa perahu (apabila sekolah berada di pulau kecil terpencil), ini mengakibatkan sering terhambatnya penyaluran dana, dan efektivitas dana menjadi terhambat. Untuk membeli biaya operasional saja membutuhkan waktu yang lebih dari 2 hari pulang pergi, sehingga dana operasional menjadi terganggu aktivitasnya untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para peserta didik.

Maka dari itu, perlu adanya stimulus khusus agar para peserta didik dan tenaga pendidikan merasa nyaman dan tenang untuk melakukan proses pembelajaran tanpa memikirkan pendanaan pendidikan dan masalah *local wisdom* yang ada di daerah tersebut. *Local wisdom* sangat kental di daerah 3T karena mereka berpegang teguh kepada adat istiadat dan norma kemasyarakatan. Pendidikan harus bersinergi dengan *local wisdom* agar proses pendidikan memiliki landasan nilai, pemikiran, dan moralitas bangsa, agar mampu menghasilkan generasi yang tangguh beriman, berkepribadian, kaya intelektualitas, dan unggul (Darmadi, H., 2018). Biaya akan memengaruhi kualitas pendidikan yang lebih efektif, tetapi akses untuk menyalurkan biaya tersebut perlu diperhatikan, agar pendanaan BOS sebagai satu-satunya jalan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan prinsip bahwa pengelolaan dana BOS harus fleksibel, efektif, efisiensi, dan juga akuntabilitas (Winaya, I. M. A., dkk., 2022). Tanpa adanya pemerhati pendidikan di daerah, maka daerah 3T akan semakin tertinggal dari daerah lain. Baker, B. D. (2016) menjelaskan pentingnya biaya dalam bidang pendidikan, reformasi keuangan dalam sekolah serta sumber daya sekolah yang membutuhkan biaya. Bukankah bahwa pendidikan adalah sebuah investasi dan investasi dalam prosesnya membutuhkan biaya. Maka pemerintah daerah harus lebih peduli mengenai kebijakan, perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang harus berkesinambungan. Kesinambungan ini penting dalam manajemen biaya pendidikan, agar semakin baiknya pengelolaan biaya pendidikan, maka akan semakin baik pula hasil *output* dari sekolah sebagai produktivitas suatu bangsa.

4. SIMPULAN

Pendidikan tidak bisa lepas dari aspek pembiayaan, dan dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya biaya. Biaya diperlukan untuk pemenuhan komponen yang menjadi unsur utama pendidikan, seperti pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan aktivitas pedagogi (pengajaran) yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri. Maka dalam arti sederhana, pembiayaan sebagai *facilitating element* memberikan pengaruh nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Keterpenuhan dana dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan peluang kepada lembaga pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan, sehingga potensi peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, menjadi manusia yang cerdas serta memiliki kemampuan yang mendukung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran diri dan masyarakat. Pembiayaan dalam dimensi user (pengguna) maupun penyelenggara (pemerintah) merupakan *facilitating element* untuk mewujudkan tujuan pendidikan yakni sebagai *human capital* dan *human investment*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47-64.
- Andi, M., Murniati, A. R., & Usman, N. (2015). Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).
- Baker, B. D. (2016). *Does money matter in education?*. Albert Shanker Institute.
- Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur. (2021, Oktober 14). Dana Bos Afiriasi dan Kinerja. <https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id/site/detailpost/dana-bos-afiriasi-dan-kinerja>
- Darmadi, H. (2018). Educational management based on local wisdom (descriptive analytical studies of culture of local wisdom in West Kalimantan). *Journal of Education, Teaching and Learning*, 3(1), 135-145.
- Fattah, N. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Gismar, A. M., Hidayat, L., Loekman, I., Suharmawijaya, D. S., Harjanto, N., Sulistio, H., ... & Ekawati, R. (2014). Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Habsyi, I. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate. *EDUKASI*, 14(2).
- Hadiyanto, H. (2004). *Mencari sosok desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia* (pp. 1-208). Rineka Cipta.
- Johns, R. L., & Morphet, E. L. (1975). The economics and financing of education. A systems approach.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013.
- Kuddy, A. L. L. (2018). Partisipasi Masyarakat, Transparansi Anggaran, dan Peran Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Sektor Pendidikan di Kabupaten Paniai. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231-240.
- Parker, L., & Sudiby, L. (2022). Why young people leave school early in Papua, Indonesia, and education policy options to address this problem. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 1-17.
- Putera, M. T. F., & Rhussary, M. L. (2018). Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Mahakam Hulu. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 12(2), 144-148.
- Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63.

- Samputra, P. L. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*.
- Saputra, A. (2018). Allocation of Education Budget in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 141-147.
- Shaturaev, J. (2022). FINANCING PUBLIC EDUCATION IN INDONESIA. *Архив научных исследований*, 2(1).
- Sibarani, E. E., & Tarigan, U. (2013). Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(1), 6-10.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suhardan, D, dkk. (2012) Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sulfiati, F., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 3(2), 113-122.
- Sulistyaningrum, E. (2016). Impact evaluation of the school operational assistance program (BOS) using the matching method. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 33-62.
- Supriadi, D. (2010). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tatogo, M., Layuk, T. A., & Bharanti, B. E. (2018). Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Di Kabupaten Nabire. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 276655.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Winaya, I. M. A., Putu Edy Purna Wijaya, I Nengah Sudiarta, & I Made Sutika. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *Widya Accarya*, 13(2), 133-144.
<https://doi.org/10.46650/wa.13.2.1277.133-144>